

Policy Brief MediaLink

Open Data untuk Program JKN Partisipatif

A. Latar Belakang



Profil Lembaga

Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) merupakan lembaga nirlaba yang memiliki concern terhadap pemanfaatan informasi oleh kelompok marjinal.

MediaLink bukan hanya mendorong bertambahnya informasi yang dapat diperoleh masyarakat, tapi juga bermitra agar kelompok masyarakat marjinal dapat memanfaatkan informasi tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut terkait program akses informasi JKN yang ada dalam policy brief ini, dapat menghubungi: MediaLink, Jalan Tebet Timur Dalam 8V/21, Tebet, Jakarta Selatan. Telp/Fax (021) 8308181, email: office@medialink.or.id.

Kontak untuk program ini: Ahmad Faisol (faisol@medialink.or.id), Mujtaba Hamdi (taba@medialink.or.id), Nurun Najib (najib@medialink.or.id).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersifat universal mulai berlaku 1 Januari 2014, sebagai bentuk peran negara dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga negaranya. Secara prinsip, program jaminan sosial semacam ini merupakan salah satu penerapan prinsip pembangunan untuk semua yang menjadi target dalam inisiatif pembangunan Post 2015.

Dalam inisiatif pembangunan Post 2015, prasyarat yang menentukan keberhasilan program pembangunan agar dapat dinikmati seluruh masyarakat adalah adanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program tersebut. Laporan The UN High Level Panel of Eminent Persons Report (*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*)¹, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan anggota *co chair* bersama Presiden Liberia dan PM Inggris, menyebutkan akuntabilitas sebagai inti dari kemitraan global yang dibangun dalam kerangka inisiatif pembangunan Post 2015. Akuntabilitas tersebut hanya akan dapat terwujud apabila seluruh masyarakat mendapat informasi yang memadai dan mudah digunakan.

Pemerintah Indonesia sudah memiliki modal untuk mewujudkan akuntabilitas melalui kebijakan jaminan untuk memperoleh informasi yang memadai dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Indonesia sudah mengesahkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang merupakan jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Saat ini, Indonesia juga menduduki posisi chairmanship inisiatif untuk mewujudkan pemerintahan terbuka (*Open Government Partnership/OGP*). Modal ini sudah sangat cukup mewujudkan keterbukaan informasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

MediaLink berpendapat pelaksanaan program open data terkait pelaksanaan program JKN merupakan bentuk integrasi program keterbukaan informasi dan program pembangunan. Dengan demikian, keterbukaan informasi yang ingin didorong melalui pelaksanaan UU KIP dan diakselerasi melalui partisipasi Indonesia dalam inisiatif OGP,

¹ A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development . The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda http://www.un.org/sglmanagement/pdf/HLP_P2015_Report.pdf

akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keterbukaan informasi bukan hanya untuk keterbukaan informasi yang berkuat pada persoalan prosedur dan mekanisme. Pada titik ini, keterbukaan informasi sebagai salah satu instrument keberhasilan pembangunan.

Persinggungan ranah akses informasi dan program pembangunan sosial seperti program JKN terletak pada potensi untuk memastikan layanan yang diberikan dapat tepat sasaran kepada kelompok sasaran yang menjadi target. Keterbukaan informasi program ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi sehingga akuntabilitas program dapat terwujud.



Profil Lembaga

Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) merupakan lembaga nirlaba yang memiliki concern terhadap pemanfaatan informasi oleh kelompok marjinal.

MediaLink bukan hanya mendorong bertambahnya informasi yang dapat diperoleh masyarakat, tapi juga bermitra agar kelompok masyarakat marjinal dapat memanfaatkan informasi tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut terkait program akses informasi JKN yang ada dalam policy brief ini, dapat menghubungi: MediaLink, Jalan Tebet Timur Dalam 8V/21, Tebet, Jakarta Selatan. Telp/Fax (021) 8308181, email: office@medialink.or.id.

Kontak untuk program ini: Ahmad Faisal (faisal@medialink.or.id), Mujtaba Hamdi (taba@medialink.or.id), Nurun Najib (najib@medialink.or.id).

B. Open Data dan Akses Informasi

Monitoring implementasi rencana aksi *Open Government Indonesia* (OGI) tahun 2013 yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam OGP menunjukkan publikasi informasi dengan memanfaatkan medium website, tanpa dibarengi kebijakan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta literasi penyediaan informasi bagi pejabat publik dan literasi pemanfaatan bagi masyarakat, menghasilkan disparitas/kesenjangan pemanfaatan informasi yang semakin besar². Selain itu, implementasi program tersebut menghasilkan data dan informasi yang terisolasi dari masyarakat yang menjadi sasaran.

Pelaksanaan program tersebut memberikan pembelajaran inisiatif publikasi informasi melalui website atau medium berbasis ICT, yang merupakan embrio pelaksanaan open data, dapat memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapat informasi, tanpa harus melewati prosedur yang cukup rumit. Pelaksanaan pilot project OGI di Provinsi Kalimantan Tengah memberikan contoh nyata, meski pun ringkasan APBD sudah terpublikasikan di website Pemerintah Provinsi, masyarakat masih dipersulit ketika melakukan permintaan dokumen tersebut secara langsung.

Untuk menghindari implikasi negatif data atau informasi terisolasi sasaran, kebijakan open data perlu memastikan penggunaan medium yang memudahkan akses masyarakat, tak terbatas kepada medium berbasis teknologi informasi terbaru. Open data harus memanfaatkan medium yang menjangkau seluruh jenis dan lapisan masyarakat, sehingga data dan informasi yang dipublikasikan mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Open data juga perlu diletakkan sebagai bagian dari kebijakan publikasi informasi proaktif dari lembaga pemerintah sesuai dengan kriteria dan standar yang diatur dalam UU KIP. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif pejabat pemerintah yang bertugas di unit ini untuk proaktif menyajikan data dan informasi melalui berbagai medium yang mudah diakses publik.

² Laporan Monitoring Implementasi Rencana Aksi OGI 2013, MediaLink, Yappika, IBC, ICW, IPC dan Yayasan TIFA. <http://www.tifafoundation.org/portfolio-item/english-independent-report-monitoring-implementation-of-open-government-partnership-in-indonesia-2012-2013/>

C. Akses Informasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Program JKN

MediaLink selama periode September-Desember tahun 2013 telah melaksanakan program pendampingan pemanfaatan akses informasi untuk isu JKN di empat wilayah, Kebumen dan Wonosobo, Jawa Tengah, serta Sidoarjo dan Lumajang, Jawa Timur. Program tersebut mengidentifikasi beberapa informasi krusial terkait pelaksanaan program JKN bagi masyarakat, antara lain: informasi terkait kepesertaan yang masuk kategori bebas iuran, tata cara pembayaran iuran dan cara klaim untuk mendapatkan pelayanan.



Profil Lembaga

Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) merupakan lembaga nirlaba yang memiliki concern terhadap pemanfaatan informasi oleh kelompok marginal.

MediaLink bukan hanya mendorong bertambahnya informasi yang dapat diperoleh masyarakat, tapi juga bermitra agar kelompok masyarakat marginal dapat memanfaatkan informasi tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut terkait program akses informasi JKN yang ada dalam policy brief ini, dapat menghubungi: MediaLink, Jalan Tebet Timur Dalam 8V/21, Tebet, Jakarta Selatan. Telp/Fax (021) 8308181, email: office@medialink.or.id.

Kontak untuk program ini: Ahmad Faisol (faisol@medialink.or.id), Mujtaba Hamdi (taba@medialink.or.id), Nurun Najib (najib@medialink.or.id).

Program tersebut juga menemukan ketidaksiapan lembaga-lembaga kesehatan di level kabupaten hingga desa melayani permintaan informasi dari masyarakat. Informasi yang gencar diberikan oleh Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan sebagai pelaksana dalam bentuk berita dan iklan di media massa, ketika ditindaklanjuti masyarakat ke lembaga-lembaga pelayanan kesehatan di daerah tidak mendapat informasi yang memadai.

FGD yang diselenggarakan MediaLink, 9 Januari 2014, menemukan adanya ketidaksinkronan antara program pemberian informasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan pemerintah daerah. Kemenkominfo mencetak dan mendistribusikan paket informasi JKN tapi tidak bisa memastikan daerah untuk menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat, karena tidak ada kewenangan untuk menginstruksikan ke daerah. Hal ini sebenarnya sudah diperkirakan MediaLink yang pernah mengusulkan adanya system layanan informasi terpadu, tapi ditolak Kemenkominfo dengan alasan memerlukan Instruksi Presiden khusus terkait hal tersebut³.

Selain persoalan layanan informasi, MediaLink juga mengidentifikasi potensi partisipasi masyarakat memastikan program JKN tepat sasaran melalui verifikasi peserta bebas iuran. Mitra MediaLink di Kebumen, Sidoarjo dan Lumajang, menemukan kepesertaan kategori bebas iuran potensial tidak tepat sasaran karena berbasis pendataan dan verifikasi yang tidak akurat. Mereka memiliki data perbandingan daftar masyarakat yang layak untuk menjadi peserta bebas iuran berbasis Rukun Tetangga (RT) sebagai alat pemerintahan yang paling mendekati masyarakat. Hanya saja, belum ada system yang dapat mengakomodir partisipasi masyarakat tersebut.

D. Policy Brief

Berdasar uraian terkait potensi open data dan identifikasi persoalan akses informasi JKN yang ditemukan, MediaLink merekomendasikan

³ Kompas, 26 Juli 2013

penyelenggaraan inisiatif open data untuk memastikan program JKN tepat sasaran kepada kelompok target. Open data bermanfaat untuk mengatasi hambatan akses informasi karena alasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Rincian inisiatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik sesuai yang dimandatkan UU KIP. Jaringan kantor BPJS Kesehatan hingga ke kabupaten/kota, potensial untuk mendekatkan informasi JKN ke masyarakat.
2. BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota untuk secara proaktif mempublikasikan daftar peserta bebas iuran, tata cara klaim bagi masyarakat setempat, jenis layanan dan daftar klaim, melalui berbagai medium, termasuk poster atau daftar peserta yang dipajang di kantor pemerintah desa.
3. BPJS Kesehatan bekerjasama dengan kementerian/lembaga lain yang terlibat program ini, mengembangkan system yang memungkinkan untuk mengadopsi verifikasi yang dilakukan masyarakat terkait dengan peserta bebas iuran. System ini memanfaatkan medium dan teknologi yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.



Profil Lembaga

Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) merupakan lembaga nirlaba yang memiliki concern terhadap pemanfaatan informasi oleh kelompok marjinal.

MediaLink bukan hanya mendorong bertambahnya informasi yang dapat diperoleh masyarakat, tapi juga bermitra agar kelompok masyarakat marjinal dapat memanfaatkan informasi tersebut.

*Untuk informasi lebih lanjut terkait program akses informasi JKN yang ada dalam policy brief ini, dapat menghubungi:
MediaLink, Jalan Tebet Timur Dalam 8V/21, Tebet, Jakarta Selatan. Telp/Fax (021) 8308181, email: office@medialink.or.id.*

*Kontak untuk program ini:
Ahmad Faisol (faisol@medialink.or.id),
Mujtaba Hamdi (taba@medialink.or.id), Nurun Najib (najib@medialink.or.id).*